

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tulisan ini membahas tentang peran *Non Governmental Organization* (NGO) dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI). NGO memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Kemunculan NGO dikatakan sebagai bentuk manifestasi dari kepentingan masyarakat sipil. NGO merupakan elemen dari masyarakat madani dan memiliki peran yang penting karena mampu menjembatani elit yang berada pada level pengambilan keputusan dengan masyarakat dengan melakukan tindakan nyata dan merupakan sebuah organisasi independen yang bersifat sosial.¹ Kemunculannya didorong karena adanya kepentingan bersama, NGO melakukan berbagai pelayanan dan fungsi kemanusiaan, meyarakan kepentingan masyarakat kepada pemerintah, memonitoring kebijakan dan mendorong partisipasi politik di level komunitas melalui berbagai cara seperti melakukan advokasi, berkerjasama dengan negara dan pemangku kepentingan dan juga dapat bekerjasama dengan akademisi demi melancarkan tujuan dari NGO tersebut.²

¹ Muhammad Faris Alfadh, *NGO Diplomacy: Peran Organisasi Non-Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Di Malaysia*, Jurnal Interdependensi, Vol.1, No.2 (Mei-Agustus 2013), Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 110, diakses dalam <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1322/1007> (1/2/2020, 13.45 WIB)

² Lovely Christina Manafe, *Peran NGO Dalam Penanggulangan Isu Perubahan Iklim: Studi Kasus Peran Friends of The Earth Dalam Mendorong Dikeluarkannya Climate Change Act 2008 Di Inggris Melalui Kampanye "The Big Ask" (2005-2008)*, Skripsi, Depok: Ilmu Hubungan Internasional,

Salah satu NGO di bidang kemanusiaan yaitu Migrant CARE yang fokus melakukan advokasi perlindungan pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya dalam rangka menegakkan hak asasi manusia.³ Migrant CARE muncul karena minimnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan bagi PMI.⁴ Migrant CARE berupaya mendesak kebijakan-kebijakan dan langkah pemerintah dalam melindungi PMI di luar negeri.⁵ Migrant CARE memiliki beberapa program yang bertujuan untuk melindungi PMI. Salah satu programnya yaitu Penanganan Kasus dan Bantuan Hukum Kepada Buruh Migran. Tujuan dari program ini yaitu untuk menyediakan pendampingan dan bantuan hukum bagi PMI yang mengalami perlakuan tidak adil dan tindakan diskriminasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menuntut haknya.⁶

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi terdapat visi misi yang tertuang dalam program Nawacita, salah satunya yaitu perlindungan terhadap PMI yang berada di luar negeri.⁷ Migrant CARE sebagai NGO yang peduli terhadap nasib PMI mengapresiasi program tersebut.⁸ Pada 2017 disahkannya Undang-Undang

Universitas Indonesia, hal. 8-9, diases dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20321854-S-Lovely%20Christina%20Manafe.pdf>

³ Betry Agrisa, *Strategi Migrant CARE Dalam Mengadvokasi Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia (Studi Kasus: Wilfrida Soik)*, Skripsi, Padang: Hubungan Internasional, Universitas Andalas, hal 7, diakses dalam <http://scholar.unand.ac.id/15227/>

⁴ Situs Resmi Migrant CARE, *Sejarah Migrant CARE*, diakses dalam <http://www.migrantcare.net/profil/sejarah/> (1/2/2020, 13.35 WIB)

⁵ Nathania Riris Michico, *Migrant CARE Adakan Kerjasama Dengan Pemerintah Desa Untuk Perlindungan TKI*, DetikNews, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-3294810/migrant-care-adakan-kerjasama-dengan-pemerintahan-desa-untuk-perlindungan-tki> (2/2/2020, 03.40 WIB)

⁶ Situs Resmi Migrant CARE, *Program Migrant CARE*, diakses dalam <http://www.migrantcare.net/program/> (14/3/2020, 16.35 WIB)

⁷ Bagus Prihanto Nugroho, *4 Tahun Jokowi-JK dan Realisasi Nawacita*, DetikNews, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-4265140/4-tahun-jokowi-jk-dan-realisasi-nawacita>

⁸ Ali Maksum, *Kebijakan Pemerintah Jokowi Terkait Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dan Implikasinya Terhadap Hubungan Dua Negara Serumpun*, Jisiera, Vol. 1 (Agustus, 2017), Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 36, diakses dalam https://www.researchgate.net/publication/325455493_KEBIJAKAN_PEMERINTAHAN_JOKO

No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) untuk merealisasikan komitmen pemerintah. Berdasarkan UU PPMI, PPMI didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.⁹ Migrant CARE berperan penting dalam melakukan advokasi RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri hingga disahkannya UU PPMI.¹⁰

Adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 mewajibkan pemerintah daerah ikut terlibat dalam mekanisme perlindungan PMI. UU ini memberikan tugas dan tanggung jawab dalam perlindungan PMI yang jelas terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab.¹¹ Selain itu UU ini mempertegas peraturan fungsi dan wewenang Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI yang sebelumnya sering kali terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang antara keduanya.¹²

WI TERKAIT TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN DUA NEGARA SERUMPUN (3/1/2020, 22.45 WIB)

⁹ Savitri Wisnuwardhani, dkk, 2018, *Buku Panduan Memahami UU PPMI: Kelebihan dan Kekurangan UU PPMI*, Jakarta Selatan: The Institute for Acosoc Rights, hal. 1, diakses dalam https://issuu.com/tifaoundation/docs/buku_panduan_memahami_uu_ppmi_-_kel (4/10/2019, 02.20 WIB)

¹⁰ Sri Wiyanti Eddyono, dkk, 2020, *Gerakan Advokasi Legislasi Untuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Jakarta: Migrant CARE, hal. 72

¹¹ Erna Ratnaningsih, *Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Business Law BINUS, diakses dalam <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/> (11/6/2020, 00.04 WIB)

¹² Seprianus Edi Hardum, *Pemerintah Sedang Susun Peraturan UU TKI yang Baru*, Berita Satu, diakses dalam <https://www.beritasatu.com/ekonomi/499066-pemerintah-sedang-susun-peraturan-turunan-uu-tki-yang-baru> (11/6/2020, 23.05 WIB)

Migrasi tenaga kerja merupakan cara yang paling logis untuk keluar dari kemiskinan.¹³ Alasan utama para pekerja melakukan migrasi internasional adalah karena adanya upah yang lebih tinggi dibanding negara asal.¹⁴ Malaysia menjadi tujuan utama para PMI. Adanya ikatan sejarah antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu alasan banyaknya PMI yang memilih bekerja di Malaysia. Selain itu gaji lebih besar ditawarkan oleh pemerintah Malaysia, dan kualifikasi kerja PMI yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi juga ikut serta dalam faktor pendorong PMI untuk mengadu nasib di Malaysia.¹⁵

Indonesia memberikan dan menjamin hak-hak buruh migran, hal itu tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁶ Meskipun telah ada UU yang mengatur tentang hak-hak PMI, nyatanya masih banyak kasus PMI di Malaysia. Pada tahun 2014-2019 Malaysia menjadi negara tujuan utama PMI. Namun Malaysia juga menempati posisi pertama dengan angka kematian tertinggi PMI. Berdasarkan data dari BNP2TKI, tahun 2014-2019 jumlah PMI meninggal di Malaysia mencapai 371

¹³ Indrasari Tjandraningsih dan Nurul Widyanigrum, *Laporan Studi Penghidupan Masyarakat Pedesaan NTT dan NTB: Krisis dan Perubahan*, Bandung: AKATIGA- Centre for Social Analysis, hal. 3, diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/453-ID-penghidupan-masyarakat-pedesaan-ntt-dan-ntb-krisis-dan-perubahan.pdf> (1/2/2020, 19.15 WIB)

¹⁴ Dilip Ratha, dkk, *Migration and Remittances for Development in Asia*, Metro Manila: the Asian Development Bank and the World Bank, hal. 8, diakses dalam <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/419611/migration-remittances-development-asia.pdf> (1/2/2010, 17.35 WIB)

¹⁵ Dinar Wahyuni, *Perlindungan TKI di Malaysia*, Jurnal Implementasi Kebijakan Perlindungan, Vol.1, No. 2 (2010), Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, hal. 149, diakses dalam http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/jurnal_kepa_karan/Aspirasi-1-2-Desember-2010.pdf#page=5 (1/2/2010, 17.45 WIB)

¹⁶ DPN SBMI, *Apa Saja Hak Buruh Migran Indonesia Dalam UU No. 18 Tahun 2017*, SBMI, diakses dalam <http://sbmi.or.id/2017/12/apa-saja-hak-buruh-migran-indonesia-dalam-uu-no-18-tahun-2017/> (1/2/2020, 19.00 WIB)

PMI meninggal. Sedangkan Arab Saudi menempati posisi kedua dengan jumlah 97 PMI meninggal dari tahun 2014-2019.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam konteks pengawasan buruh migran ke luar negeri, pemerintah telah memasukkan peran serta masyarakat sipil.¹⁸ Berdasarkan data dari Migrant CARE, terdapat 117 WNI tercatat terancam hukuman mati di Malaysia per Maret 2018.¹⁹ Kekerasan merupakan bagian dari keseharian yang dialami oleh PMI di Malaysia. Seperti kasus kekerasan yang dialami oleh Suyantik asal Sumatera Utara. Suyantik ditemukan pingsan dekat selokan pada 21 Desember 2016 mengalami luka di sekujur tubuh serta lebam pada mata.²⁰ Kasus lainnya yaitu pada Februari 2018 Adelina ditemukan tewas didepan rumah majikannya di Penang dalam kondisi luka-luka yang diduga karena adanya peniksaan oleh majikan.²¹

Migrant CARE berupaya menyebarkan substansi dari UU PPMI kepada masyarakat luas. Kegiatan yang dilakukan Migrant CARE didukung oleh Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender (MAMPU) dengan

¹⁷ *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2018*, BNP2TKI, hal. 33-34, diakses dalam https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf (19/12/2019, 21.30 WIB)

¹⁸ Sekretariat Migrant CARE, Rapat Dengar Pendapat Umum Dengan Panitia Kerja RUUPPILN Komisi IX, Migrant CARE, diakses dalam https://www.youtube.com/watch?v=8RBThW_FjXo&feature=emb_title (10/07/2020, 21.00 WIB)

¹⁹ Danu Damarjadi, *Migrant CARE: 178 WNI Terancam Hukuman Mati Di Luar Negeri*, DetikNews, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-3942338/migrant-care-178-wni-terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri> (2/2/2020, 04.54 WIB)

²⁰ Dhimas Ginanjar, *Aniaya Berat TKW 19 Tahun, Majikan Divonis Ringan Pengadilan Malaysia*, JawaPos, diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-3942338/migrant-care-178-wni-terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri> (3/10/2019, 23.47 WIB)

²¹ Ardi Priyatno Utomo, *Penyiksaan TKI di Malaysia, Kisah Suram Yang Seolah Tiada Akhir*, Kompas, diakses dalam <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/13/19581311/penyiksaan-tki-di-malaysia-kisah-suram-yang-seolah-tiada-akhir?page=all> (14/12/2019, 02.00 WIB)

mengadakan sosialisasi dan diskusi tentang pengawalan implementasi UU PPMI.²² Pemerintah juga melakukan kegiatan ini namun terbatas pada dinas saja, sedangkan Migrant CARE mengisi kesenjangan tersebut dengan berfokus pada masyarakat luas.²³

Migrant CARE yang merupakan NGO yang berada di Asia Tenggara yakni di Indonesia dan Malaysia, tentunya memiliki fokus terhadap wilayah ini. Salah satu programnya yaitu penguatan kerjasama dan advokasi terhadap buruh migran di Asia Tenggara. Adanya program ini memperlihatkan bahwa Migrant CARE memiliki perhatian khusus terhadap negara tujuan migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara, khususnya Malaysia.²⁴ Migrant CARE memiliki kepedulian tinggi terhadap kasus kekerasan PMI di Malaysia. Berdasarkan data statistik, jumlah pengaduan di Malaysia menempati posisi tertinggi pada tahun 2015- 2019.²⁵ Hal ini kemudian menjadi hal penting bagi pemerintah dan juga Migrant CARE dalam menangani permasalahan tersebut. Diketahui bahwa Migrant CARE juga telah bekerjasama dengan beberapa NGO yang ada di Malaysia yang berfokus pada perlindungan buruh, salah satunya TENAGANITA.²⁶

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perlu untuk dikaji lebih dalam terkait upaya Migrant CARE dalam memberikan perlindungan bagi

²² Zulyani Evi, *Mengahayati UU PPMI*, Migrant CARE, diakses dalam <http://www.migrantcare.net/2018/05/mengahayati-uu-ppmi/> (20/06/2020, 01.14 WIB)

²³ *Ibid.*

²⁴ *Program Migrant CARE, Loc. Cit.*

²⁵ *Data Penempatan Dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2018, Loc. Cit.*

²⁶ Migrant CARE, News Letter Migrant CARE Edisi Juli-Desember 2014, hal. 10, diakses dalam http://www.migrantcare.net/wp-content/uploads/2018/11/Newsletter-Migrant-CARE-Edisi-I-2018_min.pdf

PMI di Malaysia sebagai negara dengan angka pengaduan tertinggi PMI pada tahun 2015-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian **“Bagaimana Upaya Migrant CARE dalam Melindungi PMI di Malaysia?”**

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Memahami permasalahan pekerja migran Indonesia di Malaysia yang menjadi perhatian dari pemerintahan Presiden Jokowi
2. Menjelaskan upaya Migrant CARE sebagai NGO yang membantu pemerintah Indonesia dalam merealisasikan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia sebagai amanah UU No 18 Tahun 2017
3. Menjelaskan strategi Migrant CARE berdasarkan strategi *Transnational Advocacy Network*

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Migrant CARE dalam membantu pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Migrant CARE dalam mengatasi masalah pekerja migran Indonesia di Malaysia berdasarkan strategi *Transnational Advocacy Network*

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pertama yaitu jurnal dengan judul “*Peran Migrant CARE dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2015*” yang disusun oleh Yovi Arista.²⁷ Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, studi pustaka dan observasi. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yaitu Gerakan Sosial Baru, *Civil Society*, serta Migrasi dan Buruh Migran. Dengan konsep tersebut penulis ingin melihat bagaimana peran Migrant CARE sebagai entitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi kepentingan buruh migran Indonesia serta menganalisa faktor pendukung dan kendala bagi Migrant CARE dalam menjalankan perannya. Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa Migrant CARE sebagai entitas masyarakat sipil pada tahun 2014-2016 mampu membangun upaya-upaya yang solutif dalam mengadvokasi kepentingan buruh-buruh migran Indonesia.

Penelitian terdahulu pertama ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu dalam penggunaan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka.

²⁷ Yovi Arista, *Peran Migrant CARE Dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh-Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2016*, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 6, No. 3 (juni 2017), Semarang: Universitas Diponegoro, diakses dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/16603/15977>

Persamaan lainnya yaitu pembahasan mengenai upaya Migrant CARE dalam memberikan perlindungan bagi buruh migran. Namun yang membedakannya yaitu penelitian yang penulis teliti spesifik pada upaya perlindungan Migrant CARE bagi PMI di Malaysia dalam membantu pemerintah Indonesia meralisasikan UU PPMI pada tahun 2014-2019, sedangkan pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada Advokasi yang dilakukan oleh Migrant CARE. Perbedaan lainnya terdapat pada konsep yang akan digunakan untuk menjelaskan kasus yang diteliti.

Penelitian terdahulu kedua yaitu skripsi dengan judul “*Analisa Peran Internasional Organization of Migration (IOM) dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Humanitarisme*” yang disusun oleh Tri Robbiul Asfa.²⁸ Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yaitu *International Governmental Organization* (IGO) dan Prinsip-prinsip Humanitarianisme. Adanya konsep tersebut, penulis ingin mendeskripsikan peran IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia di Indonesia. Dalam penelitian terdahulu ini dijelaskan bahwa Indonesia berada pada peringkat pertama kasus perdagangan manusia.

Penelitian terdahulu kedua ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya terletak pada penggunaan metode deskriptif kualitatif dan pembahasan mengenai peran Organisasi dalam menangani

²⁸ Tri Robbiul Asfa, *Analisa Peran Internasional Organization of Migration (IOM) Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Humanitarianisme*, Skripsi, Padang: Hubungan Internasional, Universitas Andalas, diakses dalam <http://scholar.unand.ac.id/28946/> (01/02/2020, 17.45 WIB)

kasus kemanusiaan. Sedangkan perbedaannya mengenai topik penelitian, dimana penelitian terdahulu membahas tentang peran IGO sedangkan penulis membahas tentang NGO yang berasal dari Indonesia yaitu Migrant CARE. Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan konsep atau teori. Penelitian terdahulu menggunakan konsep IGO dan Prinsip-prinsip Humanitarianisme, sedangkan penulis menggunakan konsep NGO dan TAN.

Penelitian terdahulu ketiga yaitu skripsi dengan judul “*Strategi Migrant CARE untuk Mempengaruhi Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Tahun 1990*” yang disusun oleh Andini Putri Legita.²⁹ Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* yang digunakan untuk mendeskripsikan strategi Migrant CARE beserta jaringannya. Dalam penelitian terdahulu ini dijelaskan bahwa Migrant CARE merupakan satu-satunya NGO di Asia Tenggara yang menjadi anggota dalam *International NGO Platform on Migrant Worker Convention* (IPMWC). Batasan penelitian terdahulu ini yaitu pada tahun 2004 hingga 2009.

Penelitian terdahulu ketiga ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pembahasan mengenai upaya Migrant CARE untuk melindungi

²⁹ Andini Putri Legita, *Strategi Migrant CARE Untuk Mempengaruhi Indonesia Dalam Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990*, Skripsi, Padang: Hubungan Internasional, Universitas Andalas, diakses dalam <http://scholar.unand.ac.id/14431/> (17/11/2029, 22.25 WIB)

pekerja migran Indonesia yang menggunakan konsep TAN. Sedangkan perbedaannya yaitu pembahasan secara keseluruhan dan penggunaan konsep NGO.

Penelitian terdahulu keempat yaitu jurnal yang berjudul *“Peran International Labor Organization (ILO) Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2012-2016”* yang disusun oleh Cici Valensy.³⁰ Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan Perspektif Pluralis dengan Teori Organisasi Internasional dan Konsep Peran dalam Organisasi Internasional. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ILO berperan dalam upaya melindungi seluruh buruh yang mengalami permasalahan dalam ketenagakerjaan.

Penelitian terdahulu keempat ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yaitu terdapat pada penggunaan metode deskriptif kualitatif dan pembahasan mengenai peran sebuah organisasi. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini mengangkat tentang peran Organisasi Pemerintah atau IGO sedangkan penulis membahas tentang NGO. Perbedaan lainnya yaitu pada penggunaan konsep dimana penelitian terdahulu menggunakan konsep Organisasi Internasional, sedangkan penulis menggunakan konsep turunan dari organisasi internasional yaitu konsep NGO.

Penelitian terdahulu kelima yaitu skripsi dengan judul *“Strategi Migrant CARE dalam Mengadvokasi Perempuan Indonesia di Malaysia (Studi Kasus:*

³⁰ Cici Valensy, *Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2012-2016*, JOM FISIP, Vol. 4, No. 2 (2017), Pekanbaru: Universitas Riau, diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/207440-none.pdf>

Wilfrida Soik)” yang disusun oleh Betry Agrisa.³¹ Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep yaitu *Non Government Organization* (NGO) dan *Transnational Advocacy Network* (TAN). Penulis menggunakan kedua konsep tersebut untuk menganalisa bagaimana peran yang dilakukan oleh Migrant CARE dalam mengadvokasi kasus Wilfrida Soik. Dalam penelitian terdahulu ini dijelaskan bahwa Migrant CARE telah melakukan advokasi selama lima tahun terhitung dari Desember 2010 hingga 2015.

Penelitian terdahulu kelima ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terletak pada penggunaan metode deskriptif kualitatif dan juga penggunaan konsep *Non Governmental Organization* (NGO) karena dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti ini membahas tentang upaya Migrant CARE yang merupakan salah satu aktor NGO yang menyuarakan hak-hak pekerja migran yang dianalisis menggunakan konsep TAN. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan sudut pandang menganalisis kasus.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Penelitian	Jenis Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Jurnal: Peran Migrant Care dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2016	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Migrant CARE mampu membangun upaya-upaya solutif dalam mengadvokasi kepentingan buruh migran Indonesia - Migrant CARE melakukan pendampingan kasus, advokasi kebijakan, penelitian, juga pemberdayaan buruh

³¹ Betry Agrisa, *Loc. Cit.*

	Oleh: Yovi Arista	Pendekatan : Gerakan Sosial, <i>Civil Society</i> , Migrasi dan Buruh Migran	migran untuk mendorong gerakan inisiatif perwujudan tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan kedaulatan bagi buruh migran. - Faktor yang mendukung peran Migran CARE adalah citra positif, strategi dan tujuan yang diterima secara sosial dan dukungan dalam aspek finansial maupun politik - Tantangan yang dihadapi yaitu perspektif pemerintah yang belum berpihak kepada buruh migran, praktik korupsi dalam pelayanan buruh migran, serta dinamika internal organisasi
2	Skripsi: Analisa Peran <i>International Organization of Migration</i> (IOM) dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Humanitarianisme Oleh: Tri Robbiul Asfa	Deskriptif Kualitatif Pendekatan: <i>International Governmental Organization</i> (IGO), dan Prinsip-Prinsip Humanitarianisme	- IOM telah membantu Pemerintah Indonesia dalam menciptakan instrumen hukum - IOM bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam mengurangi perdagangan manusia melalui layanan konsultasi, dan kerjasama teknis dalam isu migrasi - IOM bekerjasama dengan Polisi Indonesia dalam mengendalikan perdagangan manusia melalui Proyek Reformasi Polisi - IOM memberikan bantuan operasional untuk menangani korban perdagangan manusia yang meliputi penyediaan tempat penampungan,

			<p>konseling psikologi, konsultasi hukum, jaminan kesehatan, bantuan transportasi, bantuan usaha mikro, dan pendidikan/pelatihan.</p>
3	<p>Skripsi: Strategi Migrant Care untuk Mempengaruhi Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Tahun 1990</p> <p>Oleh : Andini Putri Legita</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p> <p>Pendekatan: <i>Transnational Advocacy Networks</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masuknya Migrant CARE dalam koalisi IPMWC mampu memperbesar pengaruh NGO tersebut dalam mendorong Indonesia meratifikasi Konvensi Migran - Dalam upaya mendorong pemerintah meratifikasi Konvensi Migran 1990, Migrant CARE tidak hanya bekerjasama dengan IPMW, tetapi juga dengan ARAK 90, Pemerhati Pekerja Migran Indonesia, ILO, dan HRW. - Setelah delapan tahun sejak penandatanganan konvensi migran, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2012.
4	<p>Jurnal: Peran <i>International Labor Organization</i> (ILO) dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi Tahun 2012-2016</p> <p>Oleh: Cici Valensy</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p> <p>Pendekatan: Organisasi Internasional Dan Peran Dalam Organisasi Internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam melaksanakan perannya ILO telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi pekerja migran. - ILO merancang konvensi terkait pekerja migran antara lain: Konvensi Migrasi Untuk Pekerjaan, Konvensi Pekerja Migran, <i>United Nation Convention on The Protec of the Right of All Migrant Worker and Member of Families</i> Tahun 1990

			<ul style="list-style-type: none"> - ILO bekerjasama dengan Indonesia dalam merancang RUU mengenai pekerja buruh, dimana ILO memberikan bantuan teknis dalam setiap prosesnya. - ILO juga mengadakan kampanye-kampanye terkait segala informasi mengenai pentingnya buruh migran.
5	<p>Skripsi: Strategi Migrant CARE dalam Mengadvokasi Perempuan Indonesia di Malaysia (Studi Kasus: Wilfrida Soik)</p> <p>Oleh: Berty Agrisa</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p> <p>Pendekatan: <i>Non Governmental Organization</i> dan <i>Transnational Advocacy Network</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Migrant CARE melakukan advokasi dalam kasus Wilfrida Soik selama lima tahun hingga akhirnya berhasil - Keberhasilan dari advokasi kasus Wilfrida Soik merupakan gabungan dari upaya kerjasama yang dijalin Migrant CARE dengan beberapa pihak, baik lokal, nasional maupun internasional. - Bersama mitra kerjasamanya yang kemudian membentuk sebuah jaringan Migrant CARE kemudian menerapkan seluruh strategi yang terdapat dalam konsep <i>transnational advocacay network</i>.
6	<p>Skripsi: Upaya <i>Migrant CARE</i> dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia</p> <p>Oleh: Nadya Rizki Ilhami</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p> <p>Pendekatan:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Malaysia merupakan negara tujuan utama para PMI pada tahun 2014-2018 - Malaysia menempati posisi pertama pemulangan PMI meninggal pada tahun 2015-2018 - Migrant CARE mengapresiasi pasangan Jokowi-JK karena dianggap lebih serius

		<i>Non Governmental Organization dan Transnational Advocacy Network</i>	dalam memberikan perlindungan bagi PMI, namun nyatanya sampai saat ini masih terjadi kasus pelanggaran HAM terhadap PMI - Migrant CARE sebagai NGO yang peduli terhadap nasib PMI berupaya memberikan perlindungan bagi PMI di Malaysia
--	--	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1 *Non-Governmental Organization* (NGO)

Sondang P. Siaga dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Administrasi* mengatakan organisasi sebagai “Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut bawahan”.³² Sedangkan organisasi internasional secara umum yang dijelaskan oleh Daniel S. Cheever yaitu peraturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan sederhana serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.³³

Berdasarkan keanggotaan serta sifat hukum yang mengatur kegiatan organisasi yang bersangkutan, apakah diatur berdasarkan hukum publik atau

³² Teuku May Rudy, 2009, *Administrasi & Organisasi Internasional*, Edisi Kedua, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 66

³³ *Ibid.*, hal. 2-3

berdasarkan hukum keperdataan, maka penggolongan organisasi internasional terbagi menjadi dua yaitu *Inter-Government Organization* (IGO) dan *Non-Government Organization* (NGO atau INGO).³⁴ IGO merupakan organisasi yang beranggotakan pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi yang administrasinya diatur berdasarkan hukum publik. Sedangkan NGO merupakan Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki ruang lingkup internasional dan berluang lingkup domestik.³⁵

Tulisan ini berfokus pada NGO atau Organisasi Non-Pemerintah. Organisasi Non-Pemerintah dapat bersifat internasional yang disebut INGO (*International Non-Governmental Organization*) dan dapat pula hanya bersifat intra-nasional yang disebut NGO (*Non-Governmental Organization*). Perbedaan antara NGO dan INGO hanya pada keanggotaan, mitra organisasi serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut. Namun NGO yang bersifat intranasional saja, tidak menghambat organisasi itu beserta tokoh-tokohnya untuk dikenal secara internasional, dan sewaktu-waktu bisa menjadi aktor internasional.³⁶ NGO dapat pula bersifat internasional (INGO) dengan ruang lingkup terbatas secara regional saja.³⁷

Perlu diketahui bahwa terdapat organisasi/ lembaga nasional masing-masing negara, tetapi menjalankan program internasional ke mancanegara. Begitu pula dengan NGO yang didirikan pada masing-masing negara, tetapi programnya

³⁴ *Ibid.*, hal. 16-17

³⁵ *Ibid.*, hal. 5

³⁶ *Ibid.*, hal. 19

³⁷ *Ibid.*

bersifat internasional.³⁸ Adanya organisasi internasional seperti IGO dan NGO/INGO memperlihatkan bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor penting (*unitary actor*) dalam hubungan internasional. Menurut Thomas Prinen, NGO merupakan salah satu aktor esensial dalam hubungan internasional karena memiliki sumber daya yang cukup besar yaitu: Kedekatan dengan media masa, memiliki informasi serta pengetahuan yang saintifik, transparansi data dan informasi, dan jaringan NGO antar bangsa.³⁹

NGO merupakan organisasi masyarakat sipil yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat sipil untuk menangani isu atau persoalan sosial tertentu, misalnya pelanggaran HAM, korupsi, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Melalui NGO, masyarakat sipil mendapatkan wadah untuk mengadvokasi dan memperjuangkan isu-isu yang dianggap penting.⁴⁰ NGO merupakan organisasi yang bukan berasal dari bagian pemerintah, birokrasi ataupun negara. NGO memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) Organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara, (b) NGO bersifat nirlaba, yaitu ketika melakukan kegiatannya tidak berorientasi pada keuntungan, (c) Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak untuk kepentingan anggota seperti organisasi lainnya.⁴¹

³⁸ *Ibid.*, hal. 71

³⁹ Thomas Prinen, 1994, hal 29, dalam M. Faris Alfadh, *NGO Diplomacy: Peran Organisasi Non-Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran di Malaysia*, Jurnal Interdependensi, Vol. 1, No. 2 (2010), Yogyakarta: Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 29, diakses dalam <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1322/1007> (01/02/2020, 21.33 WIB)

⁴⁰ Djohan Rady Rejgunung, *Membangun NGO Yang Kuat*, Friedrich Naumann Stiftung, diakses dalam <https://indonesia.fnst.org/content/membangun-ngo-yang-kuat> (01/02/2020, 22.20 WIB)

⁴¹ Rizky Madya Wulan dan Muhammad Muktiali, *Peran Non Governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) Terhadap Klaster Susu Sapi Perah Di Kabupaten Boyolali*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol.1, No. 2 (2013), Semarang: Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, hal .159, diakses dalam <https://www.researchgate.net/publication/298726814> *Peran Non Governmental Organization G*

Menurut Michael Yaziji dan J. Doh dalam bukunya yang berjudul *Understanding NGOs, NGOs and Corporations: Conflict and Colaboration* tahun 2009, berdasarkan aktivitasnya NGO dapat dikategorikan menjadi *Advocacy NGOs*, *Service NGOs*, *Hybrid* dan *Evolving NGO*.⁴²

1. *Advocacy NGO* yaitu NGO yang bekerja untuk mempromosikan sistem sosial, ekonomi ataupun sistem politik serta mempromosikan seperangkat kepentingan atau ideologi. *Advocacy* dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu *Watchdog NGOs* dan *Social Movement*. *Watchdog* merupakan NGO yang sifatnya mengawasi pemerintah, dan juga mengawasi lembaga-lembaga ekonomi, legislatif, sosial dan politik. Sedangkan *Social Movement* lebih mengarah pada mengkritisi sistem yang ada atau tidak mendukung sistem atau bahkan bertujuan untuk mengubah sistem yang ada.⁴³
2. *Service NGOs* merupakan NGO yang menyediakan barang maupun jasa kepada klien yang kebutuhannya tidak terpenuhi. NGO ini muncul sebagai bentuk respon atau krisis politik, negara yang tingkat korupsi dan hutang yang tinggi, dan permasalahan global yang membuat negara tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya.⁴⁴

IZ dan LSM Bina Swadaya terhadap Klaster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali (01/02/2020, 05.30 WIB)

⁴² Michael Yaziji dan J. Doh, 2009, *Understanding NGOs and Corporations: Conflict and Colaboration*, Inggris: Cambridge University Press, hal. 6-7, diakses dalam <http://www.cambridge.org>.

⁴³ *Ibid.*, hal. 8

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 9

3. *Hybrid and Evolving NGOs* yaitu perpaduan antara *advocacy NGO* dan *service NGO*. *Hybrid and Evolving NGOs* adalah NGO yang mengawasi lembaga pemerintahan dan mengkritisi suatu sistem dan juga menyediakan fasilitas jasa kepada masyarakat. NGO ini mengilustrasikan hubungan antara masyarakat madani, pergerakan sosial sehingga mendorong munculnya berbagai NGO.⁴⁵

Konsep *Non Governmental Organization* (NGO) digunakan oleh peneliti untuk melihat upaya Migrant CARE sebagai NGO yang berupaya membantu dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan kewajibannya melindungi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Berdasarkan tiga kategori yang dijelaskan diatas, maka Migrant CARE dapat digolongkan sebagai *Hybrid dan Evolving NGOs*.

1.5.2 Strategi Transnational Advocacy Network

Advokasi merupakan tindakan pembelaan terhadap hak dan kepentingan publik, bukan berdasarkan kepentingan pribadi karena yang diperjuangkan dalam advokasi tersebut adalah hak dan kepentingan kelompok masyarakat (*public inters*). Advokasi dapat dikatakan sebagai tindakan-tindakan yang dirancang untuk mengubah suatu kebijakan yang dinilai merugikan dan memberikan dampak buruk terhadap masyarakat.⁴⁶ Maggie Black menjelaskan definisi advokasi dalam bukunya yang berjudul *A Hand Book on Advocacy* sebagai segala aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik di antara pengambilan keputusan

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sekretariat Kadin Indonesia, *Pedoman Advokasi Kebijakan*, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri Indonesia, hal. 4, diakses dalam <https://adoc.pub/pedoman-advokasi-kebijakan.html> (2/02/2020, 13.52 WIB)

dan khalayak umum atas sebuah masalah atau kelompok masalah dalam rangka menghasilkan berbagai perubahan kebijakan dan perbaikan situasi.⁴⁷

Transnational Advocacy Network atau jaringan advokasi lintas batas merujuk pada kelompok advokasi mandiri yang bekerja secara sukarela (*voluntary collective action*) dan melintasi batas negara untuk mencapai kepentingan yang mereka anggap dapat mempresentasikan kepentingan publik yang luas.⁴⁸ Dalam TAN terdapat tujuh aktor yang mampu memberikan kontribusi, yaitu: (1) NGO berskala domestik maupun berskala internasional; (2) *Local social movement*, (3) Yayasan; (4) Media; (5) Organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, (6) Bagian dari organisasi regional dan *intergovernmental*; (7) Badan-badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintah. Namun dalam membentuk jaringan advokasi lintas batas tidak diperlukan seluruh aktor-aktor tersebut. Hanya dengan beberapa aktor saja, jaringan advokasi transnasional dapat terbentuk.⁴⁹

Dalam melakukan advokasi, aktor non negara menggunakan taktik dan strategi untuk mempengaruhi dan menekan negara agar mengadopsi tuntutan yang mereka suarkan.⁵⁰ Taktik dan strategi tersebut antara lain, informasi politik (*information politics*), politik simbolik (*symbolic politics*), politik pengaruh (*leverage politics*), dan politik akuntabilitas (*accountability politics*) sebagaimana

⁴⁷ Maggie Black, 2002, *A Hand Book on Advocacy, Child Domestic Workers: Finding a Voice*, UK: Anti-Slavery International, hal 11, diakses dalam <https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3908&context=globaldocs> (2/02/2020, 12.00 WIB)

⁴⁸ Ani Soetjipto, 2018, *Transnasionalisme Peran Aktor Non Negara Dalam Hubungan Internasional*, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 36

⁴⁹ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*, Blackwell Publishers, hal. 91-92, diakses dalam <http://courses.washington.edu/pbaf531/KeckSikkink.pdf> (18/01/2020, 22.35 WIB)

⁵⁰ Ani Soetjipto, *Loc. Cit.*, hal. 38

yang dijelaskan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink yang dijabarkan sebagai berikut:⁵¹

- a. *Information politic*: Penggunaan analisis data riset yang dijadikan bahan advokasi dan kampanye yang dilakukan. Pertukaran informasi dalam TAN dapat dilakukan melalui internet dan media sosial.⁵² Untuk mencapai keberhasilannya, aktor TAN akan menyampaikan pesan yang dapat menggerakkan massa untuk memberikan dukungan.⁵³ Dengan demikian, politik informasi merupakan kemampuan untuk menghasilkan informasi dengan cepat dan kredibel yang berguna secara politik dan untuk mengarahkan upaya advokasi sehingga memiliki dampak advokasi yang besar.⁵⁴
- b. *Symbolic politic*: Upaya untuk membingkai isu yang di advokasi dalam bahasa yang lebih umum agar bisa menarik dukungan dari banyak pihak. Untuk mendapatkan dukungan luas, dalam advokasi perlu dilakukan *framing* dengan bahasa yang sederhana dan singkat, misalnya dalam bentuk slogan atau jargon yang kemudian dijadikan sebagai alat kampanye.⁵⁵
- c. *Leverage politic*: Menggunakan pengaruh aktor yang lebih kuat untuk dapat mengubah kebijakan aktor target seperti pemerintah, organisasi internasional maupun perusahaan multinasional. Keck dan Sikkink membagi dua pengaruh politik, yaitu pengaruh material dan moral (*material*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Loc. Cit.*

⁵⁴ Ani Soetjipto, *Loc. Cit.*

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 39

and moral leverage). Pengaruh material berhubungan dengan bantuan donor, sedangkan pengaruh moral berkenaan dengan cara aktivis menanamkan rasa segan atau malu (*mobility of shame*) pada target sehingga menjadi sorotan orang banyak.⁵⁶

- d. *Accountability politic*: Upaya untuk meyakinkan pemerintah atau aktor lain untuk mengubah posisi mereka dalam suatu isu. Ketika aktor target telah berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan kebijakan sesuai nilai-nilai yang telah disepakati, aktor TAN kemudian menggunakan posisinya untuk mengamati target. Politik akuntabilitas adalah upaya untuk mempertahankan aktor yang kuat agar tetap memegang prinsip yang telah ditetapkan.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan menggunakan empat strategi *transnational advocacy network* yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink yaitu *information politic*, *symbolic politic*, *leverage politic* dan *accountability politic* untuk menganalisis bagaimana strategi Migrant CARE dalam memberikan perlindungan bagi PMI di Malaysia.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diawali dengan pengumpulan data, menganalisis, serta menginterpretasikan objek yang dibahas serta menjawab

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 40

⁵⁷ *Ibid.*

pertanyaan secara objektif.⁵⁸ Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang upaya Migrant CARE dalam membantu Pemerintah Indonesia melindungi PMI di Malaysia.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan Nor Zanna selaku staf Program Officer Migrant CARE Kuala Lumpur dan Ika Masruroh selaku staf Divisi Bantuan Hukum Migrant CARE Jakarta. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan metode atau teknik pengumpulan dan mempelajari serta meneliti data-data dan informasi yang terkumpul dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, paper, laman situs resmi Laporan Kerja BNP2TKI, situs resmi Migrant CARE, situs resmi Sumber Daya Buruh Migran, serta literatur yang relevan dengan pembahasan sehingga dapat mendukung proses penulisan.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Tujuan dari metode kualitatif adalah mencari pengertian mendalam tentang suatu gejala, fakta dan realita, dimana fakta dan realita hanya dapat dipahami apabila dilakukan

⁵⁸ Suryana, 2010, *METODOLOGI PENELITIAN: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

penelitian secara mendalam.⁵⁹ Dalam bukunya John W. Creswell yang berjudul *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, mengungkapkan beberapa pendekatan yang dapat dijadikan panduan dalam meneliti sebuah permasalahan untuk menemukan jawaban.⁶⁰

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian ini yaitu saat Presiden Joko Widodo memulai masa pemerintahannya pada periode pertama yaitu dari tahun 2014-2019. Prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Pemerintahan Jokowi yaitu perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Migrant CARE sebagai NGO yang peduli terhadap buruh migran mengapresiasi kebijakan tersebut.

b. Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini adalah upaya Migrant CARE dalam melindungi PMI di Malaysia melalui berbagai strategi.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I	Pendahuluan	1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Kerangka Teori dan Konsep
-------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁵⁹ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Garsindo

⁶⁰ John W. Creswell, 2013, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five*, Californi: SAGE Publication

		<p>1.5.1 <i>Non-Government Organization</i></p> <p>1.5.2 Strategi <i>Transnational Advocacy Network</i></p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.6.3 Teknik Analisis Data</p> <p>1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>a. Batasan Waktu</p> <p>b. Batasan Materi</p> <p>1.7 Sistematika Penulisan</p>
BAB II	Isu Pekerja Migran dan Peran Pemerintah Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	<p>2.1 Perkembangan Isu Pekerja Migran Indonesia di Malaysia</p> <p>2.1.1 Perkembangan PMI Periode Awal Kemerdekaan</p> <p>2.1.2 Perkembangan PMI Periode Tahun 2000-an hingga Sekarang</p> <p>2.2 Perkembangan Kebijakan Pemerintah Tentang Pekerja Migran Indonesia</p> <p>2.2.1 Perkembangan Kebijakan Pemerintah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017</p> <p>2.3 Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia</p>
BAB III	Analisis Upaya Migrant CARE dalam Melindung Pekerja Migran Indonesia di Malaysia	<p>3.1 Keterlibatan Non-Governmental Organization dalam Isu Pekerja Migran Indonesia</p> <p>3.2 Profil Migrant CARE</p> <p>3.2.1 Migrant CARE Kuala Lumpur</p> <p>3.3 Upaya Migran CARE dalam Mengadvokasi Perubahan UU No. 39 Tahun 2004 Menjadi UU Perlindungan PMI Berbasis Pada Hak Asasi Manusia</p> <p>3.4 Upaya Migrant CARE dalam Memberikan Bantuan Kepada PMI di Malaysia</p>
BAB IV	Analisis Strategi Migrant CARE Berdasarkan Strategi <i>Transnational Advocacy Network</i>	<p>4.1 Analisis Strategi Migrant CARE Berdasarkan Strategi <i>Transnational Advocacy Network</i></p> <p>4.2 Mengumpulkan Informasi Mengenai PMI Bermasalah di Malaysia</p> <p>4.3 Melakukan Kampanye Perlindungan PMI</p> <p>4.3 Melakukan Kerjasama dengan Pihak Lain</p>

		4.5 Memonitoring Perlindungan PMI Yang dilakukan Oleh Pemerintah
BAB V	Penutup	5.1 Kesimpulan 5.2 Saran

